

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik merupakan sistem akuntansi yang digunakan oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kepada publik. Manajemen bertanggung jawab kepada masyarakat karena sumber dana yang digunakan organisasi sektor publik berasal dari masyarakat. Menurut (Mardiasmo 2009) Akuntansi sektor publik memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks. Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan-badan pemerintahan (pemerintah pusat dan daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik negara (BUMN dan BUMD), yayasan, organisasi politik dan organisasi massa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), universitas dan organisasi nirlaba lainnya. Istilah “sektor publik” sendiri memiliki pengertian yang bermacam-macam hal tersebut merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi, politik, hukum, dan sosial) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hal publik. Tujuan organisasi sektor publik yaitu pemberian pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan masyarakat,

keamanan, penegakkan hukum, transportasi publik, dan penyediaan barang kebutuhan publik. Usaha pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara, peningkatan laba pada perusahaan-perusahaan BUMN/BUMD, upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD adalah contoh adanya tujuan finansial pada organisasi sektor publik.

2. *Stewardship Theory*

Stewardship Theory merupakan teori yang menjelaskan keadaan dimana manajer/pegawai termotivasi pada sasaran tujuan untuk kepentingan organisasi, tidak berdasarkan tujuan-tujuan individu. Pada teori ini telah dirancang dengan dasar psikologi dan sosiologi untuk dapat membentuk perilaku yang mengarah pada pelayanan (*Stewardship*). Instansi menggunakan pendekatan *Stewardship* untuk menemukan titik utama dari suatu laporan keuangan yang berdasarkan kepada suatu konsep bahwa manajemen yang dimiliki suatu instansi dianggap bertanggungjawab kepada pemilik untuk mengelola kekayaan yang telah dipercayakan kepadanya. Pada *Stewardship Theory* manajemen dianggap sebagai pihak yang telah dipercaya, memiliki kejujuran dan integritas, selain itu mampu bertindak dan bertanggungjawab untuk kepentingan publik pada umumnya ataupun *shareholder* pada umumnya.

Pada organisasi sektor publik, pemerintah sebagai pemegang amanah dituntut untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan kepada masyarakat sebagai pihak pemberi amanah dalam rangkalah mewujudkan akuntabilitas dengan melaporkan segala informasi, berkaitan dengan

keberhasilan atau kegagalan yang dialami oleh instansi. Pemerintah akan menggunakan seluruh kemampuan yang dimiliki untuk mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas. Pemerintah sebagai pihak yang menyediakan informasi dan yang memiliki tanggungjawab kepada masyarakat memiliki kesadaran untuk terus mewujudkan transparansi dan akuntabilitas melalui pengungkapan laporan keuangan yang baik dan berkualitas. (Mardiasmo, 2018 : 179)

3. Pemerintah Daerah

PP no 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa pemerintah daerah merupakan penyelenggara pemerintahan menurut asas ekonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia sesuai dengan UUD 1945. Pemerintah daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah dan DPRD (UU Nomor 32 tahun 2004). Dalam undang-undang diatur tentang hubungan antara pemerintah pusat yang memberikan hak kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota untuk mengatur wilayahnya sendiri berdasarkan karakter dari setiap daerah.

Pemerintah daerah telah diberikan hak untuk memperoleh sumber keuangan yaitu berupa kesesuaian antara penyediaan pendanaan dan urusan yang diserahkan pemerintah, hak untuk memungut, mendayagunakan pajak dan retribusi daerah, hak untuk mendapatkan bagi

hasil dari sumber daya nasional yang berada di daerah, hak mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber pendapatan lain yang berada pada daerah tersebut.

4. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan penggerak organisasi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang dimiliki oleh organisasi. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang penting untuk menciptakan laporan keuangan. Keberhasilan suatu entitas bukan hanya dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang dimiliki organisasi, melainkan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki juga memiliki peran penting dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian terhadap suatu entitas. Pada pemerintah, sumber daya manusia diatur UU nomor 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan pasal 1 ayat 10 yang menyatakan bahwa kompetensi adalah kemampuan kerja yang dimiliki seseorang untuk menyelesaikan tugas yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar yang telah disepakati. Sumber daya manusia dituntut untuk menjadi sumber daya yang kompeten. Kompetensi Sumber Daya Manusia dapat sangat berperan dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Dalam hal pelaporan keuangan, sumber daya manusia yang tidak kompeten dapat berakibat pada kekeliruan atau ketidaksesuaian dalam menerapkan logika akuntansi. Berikut dibawah ini adalah langkah-langkah meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan komponen

pembentuk kompetensi sumber daya manusia.

a. Langkah-langkah Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Uha (2014:131) mengemukakan bahwa langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kualitas pendidikan formal PNS menuju pengembangan pembangunan dan membangun wawasan keilmuan.
- 2) Mengoptimalkan diklat dan peningkatan bintek untuk mewujudkan kompetensi dan ketrampilan teknis.
- 3) Penyusunan standar kompetensi jabatan dalam menempatkan aparatur sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- 4) Pembinaan karier PNS yang terstruktur dan profesional dengan pola pikir secara umum dan kerja secara spesial dalam riil produksi.
- 5) Pengembangan jabatan fungsional menuju spesialisasi dengan kebutuhan tuntutan kerja.

c. Komponen Pembentukan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Hutapea dan Thoha (2008: 8) mengungkapkan bahwa terdapat tiga komponen utama dalam pembentukan kompetensi, Komponen ini selanjutnya akan digunakan sebagai indikator penelitian untuk mengukur kompetensi sumber daya manusia di Badan dan Dinas Pemerintah kabupaten Tuban, berikut merupakan komponen pembentukan Kompetensi Sumber Daya Manusia:

1) Pengetahuan (*knowledge*)

Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki seorang pegawai untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai bidang yang digelutinya (tertentu). Ilmu atau informasi yang dimiliki seorang pegawai dapat digunakan dalam kondisi nyata dalam suatu pekerjaan.

2) Keterampilan (*skill*)

Keterampilan merupakan suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan instansi kepada seorang pegawai dengan baik dan maksimal.

3) Sikap (*attitude*)

Sikap merupakan pola tingkah seorang pegawai di dalam peran melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan instansi.

5. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Peraturan menteri dalam negeri nomor 56 tahun 2007 sebagai pengganti peraturan dalam negeri no 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah mengatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah ialah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer setiap entitas pelaporan maupun entitas akuntansi harus dapat menyelenggarakan

sistem akuntansi pemerintahan sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan pemerintah yaitu standar akuntansi pemerintah (SAP).

Peraturan menteri dalam negeri nomor 29 tahun 2002 menyatakan bahwa prosedur sistem akuntansi keuangan daerah terdiri dari pencatatan, penggolongan dan pengiktisaran, pelaporan. Pencatatan dilakukan dengan menggunakan sistem *double entry*, *cash basis* digunakan selama tahun anggaran untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah. Penggolongan dan pengiktisaran dilakukan dengan melakukan penjurnalan dan posting ke buku besar sesuai dengan nomor perkiraan yang ditetapkan pemerintah daerah dalam standar akuntansi pemerintah (SAP). Laporan keuangan yang digunakan pada pelaporan keuangan pemerintah daerah berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan disusun untuk memberikan informasi yang relevan dan andal terkait posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas dalam satu periode pelaporan. Staf bagian keuangan akan melaporkan laporan keuangan kepada pihak-pihak yang dimaksudkan antara lain, DPRD, BPK, investor, kreditor dan donatur, analisis ekonomi dan pemerhati pemerintah daerah, rakyat, pemerintah daerah lain, dan pemerintah pusat yang ada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah.

Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berperan dalam upaya

meningkatkan kualitas laporan keuangan dalam organisasi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dengan adanya sisten akuntansi keuangan daerah diharapkan dapat menghasilkan catatan dan laporan atas transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu entitas pemerintah daerah yang lebih akurat, tepat, dan komprehensif sehingga dapat memperbaiki kualitas keputusan yang diambil pemakai laporan keuangan tersebut (Mardiasmo, 2018 : 126).

Manfaat sistem akuntansi keuangan daerah yaitu agar dapat memenuhi tuntutan masyarakat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik. Dalam struktur pemerintah daerah, satuan kerja adalah entitas akuntansi yang wajib melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi dilingkungan satuan kerja. Kegiatan akuntansi yang dilakukan pada satuan kerja adalah pencatatan atas pendapatan, belanja, aset, dan selain kas.

Sistem akuntansi keuangan daerah diterapkan dan dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD), sedangkan sistem akuntansi keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dilakukan oleh PPK-SKPD. Berdasarkan peraturan dalam negeri no 59 tahun 2007 tentang pedoman pengelola keuangan daerah bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah sekurang-kurangnya meliputi prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi aset tetap/barang milik daerah, dan prosedur akuntansi selain kas.

Prosedur akuntansi penerimaan kas dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan (PPK-SKPD). (PPK-SKPD) berdasarkan bukti transaksi penerimaan kas melakukan pencatatan kedalam jurnal penerimaan kas yang mencantumkan uraian rekening lawan penerimaan kas berkenan, dan secara periodik jurnal tersebut diposting ke buku besar.

Prosedur akuntansi pengeluaran kas dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan (PPK-SKPD). (PPK-SKPD) berdasarkan bukti transaksi penerimaan kas melakukan pencatatan kedalam jurnal pengeluaran kas yang mencantumkan uraian rekening lawan penerimaan kas berkenan, dan secara periodik jurnal tersebut diposting ke buku besar.

Prosedur akuntansi aset tetap/barang milik daerah dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan (PPK-SKPD) serta pejabat pengurus dan penyimpan barang satuan kinerja perangkat daerah. PPK-SKPD berdasarkan bukti memorial melakukan pencatatan ke dalam buku besar. Setiap aset kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan dilakukan penyusutan yang sistematis sesuai dengan masa manfaatnya. Metode penyusutan yang dapat digunakan adalah garis lurus, saldo menurun ganda, dan unit produksi.

Prosedur akuntansi selain kas dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan (PPK-SKPD). PPK-SKPD berdasarkan bukti memorial melakukan pencatatan ke jurnal umum, dan secara periodik jurnal tersebut diposting kedalam buku besar.

6. Peran Audit Internal

Audit sektor publik adalah kegiatan yang ditunjukkan terhadap entitas yang menyediakan pelayanan dan penyediaan barang yang pembiayaannya berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan Negara lainnya dengan tujuan untuk membandingkan antara kondisi yang ditemukan dengan kriteria yang ditetapkan. Audit sektor publik di Indonesia di kenal dengan audit keuangan Negara. Audit keuangan Negara diatur dalam UU No.15 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan keuangan Negara. Menurut *The Internasional Standard For The Professional Practice Of Internal Auditing* dalam Yuliani (2010), Peran yang dimainkan oleh auditor internal dibagi menjadi dua kategori utama yaitu : jasa *assurance* dan jasa konsultan. Jasa *assurance* merupakan penilaian objektif auditor internal atas bukti untuk memberikan pendapat atau kesimpulan independen mengenai proses, sistem atau subjek masalah lain. Jenis dan penugasan *assurance* ditentukan oleh auditor internal. Jasa konsultasi merupakan pemberian saran konsultasi, maka dari itu auditor internal harus tetap menjaga obyektivitasnya dan tidak memegang tanggung jawab manajemen.

Menurut (AAIPI, 2013: 10-14) standar profesi auditor internal terbagi menjadi dua standar pokok, yaitu :

1. Independensi dan Objektivitas

Dalam semua hal yang berkaitan dengan penugasan audit intern, AIP dan kegiatan audit intern harus independen serta para auditornya

harus objektif dalam pelaksanaan tugasnya. Independensi adalah kebebasan dari kondisi yang mengancam kemampuan aktivitas audit intern untuk melaksanakan tanggung jawab audit intern secara objektif. Untuk mencapai tingkat independensi yang diperlukan dalam melaksanakan tanggung jawab aktivitas audit intern secara efektif, maka pimpinan APIP memiliki akses langsung dan tak terbatas kepada atasan APIP. Ancaman terhadap independensi harus dikelola pada tingkat individu auditor, penugasan audit internal, fungsional dan organisasi.

Objektivitas adalah sikap mental tidak memihak yang memungkinkan auditor untuk melakukan penugasan sedemikian rupa sehingga auditor percaya pada hasil kerjanya dan tidak ada kompromi atas kualitas yang dibuat. Objektivitas mengharuskan auditor tidak membedakan judgement-nya terkait audit terhadap orang lain. Ancaman terhadap objektivitas harus dikelola pada tingkat individu auditor, penugasan, fungsional dan organisasi.

Peran audit internal dalam lingkungan pemerintah atau APIP terdiri dari dua peran, yaitu

- 1) Pemberian kepastian, keyakinan dan penjaminan yang memadai (*assurance*) dengan melakukan kegiatan audit, revidu, penilaian, evaluasi, verifikasi, pengujian, dan pemantauan atau monitoring.
- 2) Konsulting untuk memberikan solusi atas berbagai macam permasalahan dan pencapaian tujuan organisasi, dengan kegiatan-

kegiatan : sosialisasi, bimbingan, pendampingan, pemberian saran/petunjuk, konsultasi, pelatihan-pelatihan dan survei.

Setelah melaksanakan perannya, aparat pengawasan intern pemerintah dalam hal ini adalah inspektorat provinsi wajib untuk melakukan pendokumentasian, analisis, dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan sehingga menghasilkan laporan hasil pengawasan serta wajib menyampaikan laporan hasil audit tersebut kepada Gubernur. Laporan hasil pengawasan tersebut dapat berupa laporan hasil audit, laporan hasil revidi, laporan hasil evaluasi, dan laporan hasil pemantauan. Selanjutnya, setelah melaporkan hasil pengawasan, auditor internal wajib melakukan tindak lanjut audit yang merupakan tahap akhir dari kegiatan audit internal. Tindak lanjut ini dilakukan untuk memastikan manajemen telah melaksanakan tindakan koreksi sesuai dengan rekomendasi yang dibuat oleh auditor internal. Dengan adanya auditor internal, kontrol terhadap segala kegiatan yang ada didalam organisasi akan lebih terkendali dan akan mengurangi kemungkinan kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Sehingga, dalam proses penyusunan keuangan audit internal juga dapat berperan dalam membantu meminimalisir kemungkinan kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan dan laporan keuangan yang dihasilkan akan lebih baik.

2. Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki

oleh seseorang, berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya. Auditor harus mempunyai pendidikan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan, pengalaman serta kompetensi lain yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawabnya.

7. Pedoman Penyusunan Keuangan

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dituangkan dalam bentuk Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan wajib disusun oleh semua Kementerian/Lembaga sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran dan belanja Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

Penyajian Laporan Keuangan BLUD diatur dalam Pernyataan SAP (PSAP) 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum yang bertujuan untuk mengatur penyajian laporan keuangan BLU dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar BLU. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan akuntansi berbasis akrual.

Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP Berbasis Akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para

pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Selain mengubah basis SAP dari kas menuju akrual menjadi akrual, Peraturan Pemerintah ini mendelegasikan perubahan terhadap Pernyataan SAP (PSAP) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Perubahan terhadap PSAP tersebut dapat dilakukan sesuai dengan dinamika pengelolaan keuangan negara. Meskipun demikian, penyiapan pernyataan SAP oleh KSAP tetap harus melalui proses baku penyusunan SAP dan mendapat pertimbangan dari BPK.

Komponen laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual terdiri dari :

1) Laporan realisasi anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja, yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

2) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, ekuitas dana per tanggal tertentu.

a. Aset adalah sumber daya yang dikuasai entitas akuntansi yang timbul dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di

masa depan akan diperoleh. Manfaat ekonomi masa depan yang terkandung dalam aset adalah potensi dari aset tersebut untuk menghasilkan arus kas masuk kepada entitas akuntansi melalui penggunaan atau pelepasan aset tersebut.

b. Kewajiban merupakan kewajiban masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya di masa depan akan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas akuntansi yang mengandung manfaat ekonomi.

c. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

3) Laporan Operasional

Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu pelaporan. Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan laporan operasional, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit laporan operasional, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

4) Laporan perubahan ekuitas

Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menyajikan

informasi kenaikan atau penurunan ekuitas periode pelaporan dibandingkan dengan periode sebelumnya.

5) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan memuat pengungkapan dan penjelasan pos-pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Perubahan Ekuitas sehingga pengguna laporan dapat memperoleh pemahaman secara lebih lengkap atas laporan keuangan entitas berdasarkan SAP. Informasi dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terutama mencakup informasi singkat tentang entitas akuntansi, kebijakan akuntansi penting yang mendasari penyajian laporan keuangan, serta pengungkapan informasi penting dan penjelasan rinci atas pos-pos laporan keuangan serta informasi lain yang diharuskan untuk diungkapkan di dalam SAP.

8. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, terdapat empat karakteristik yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah daerah akan digunakan sebagai indikator penelitian untuk mengukur kualitas laporan keuangan Dinas dan Badan pemerintah daerah kabupaten Tuban, berikut merupakan karakteristik kualitatif laporan keuangan:

a) Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi

yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, memprediksi masa depan, dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

2. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

3. Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

4. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam

laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

b) Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik sebagai berikut:

1. Penyajian jujur

Informasi menggambarkan secara jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

2. Dapat diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

3. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

c) Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

d) Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

9. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian mengenai kualitas laporan keuangan pada sektor publik diantaranya pernah dilakukan oleh (Verliani Dasmaran, 2018), (Ida & Erawati, 2016), (Siti Zahrah, 2019), (Nurillah dan Muid, 2014), (Agustin 2020), (Fikri dan Sri Pancawai 2016), dan (Frasca dan

Widhy)

2019.



Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Judul	Nama Peneliti	Dimuat Di	Tahun	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Pandeglang	Verliani Dasmara n, Dkk	Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Maranatha	2018	Untuk mengetahui pengaruh dari penerapan system akuntansi pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Pandeglang	<ul style="list-style-type: none"> - Metode evaluasi sumatif. - Responden 94 orang pegawai. - menggunakan sampel jenuh 	Sistem Akuntansi Pemerintah (0.000<0.05) berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

2	Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis AkruaI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah	Ida dan Erawati	Universitas Udayana	2016	Tujuan dari penelitian ini ialah menganalisis Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis AkruaI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Metode analisis yang dipergunakan ialah analisis regresi linier berganda - Data dikumpulkan dari 108 pegawai SKPD di Kabupaten Badung 	Sumber Daya Manusia ($0.000 < 0.05$), Sistem Pengendalian Intern ($0.00 < 0.05$), Pemahaman Basis AkruaI ($0.000 < 0.05$), berpengaruh positif signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah
---	--	-----------------	---------------------	------	--	--	---

3	Pengaruh Sumber Daya Manusia Dan Manajerial terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survey pada DPPKAD Kabupaten Buol	Siti Zahrah <i>et al</i>	Universitas Tadulako	2019	untuk mengetahui pengaruh Sumber Daya Manusia Dan Manajerial terhadap Kualitas Laporan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - Metode Kuantitatif, - 47 responden - sampel jenuh - Metode analisa linear berganda 	<ul style="list-style-type: none"> - sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, $0,23 > 0,05$ dan nilai t hitung $> t$ tabel - Manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, $(0,01 < 0,05)$ <p>Sumber daya manusia dan Manajerial secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. $(0,00 < 0,05)$</p>
---	---	--------------------------	----------------------	------	---	---	---

4	Pengaruh Sumber Daya Manusia Dan Manajerial terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survey pada DPPKAD Kabupaten Buol)	Siti Zahrah <i>et al</i>	Universitas Tadulako	2019	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Sumber Daya Manusia Dan Manajerial terhadap Kualitas Laporan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - Metode Kuantitatif, - Sampel berjumlah 47 responden - Teknik pengambilan sampel yaitu sampel jenuh - Metode analisa linear berganda 	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, 2) Manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, 3) Sumber daya manusia dan Manajerial secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
---	--	--------------------------	----------------------	------	--	--	---

5.	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (SKPD) pada kota Depok	Nurillah dan Muid	Universitas Diponegoro	2014	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (SKPD)	<ul style="list-style-type: none"> - Teknik sampel menggunakan <i>purposive sampling</i> - Metode analisis menggunakan regresi linier berganda - Survey menggunakan kuesioner 	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (SKPD) pada kota Depok
----	--	-------------------	------------------------	------	---	--	---

6.	Sistem Akuntansi, Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah	Agustin	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya	2020	Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Sistem Akuntansi, Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Teknik sampel menggunakan <i>purposive sampling</i> - Metode analisis menggunakan regresi linier berganda - Survey menggunakan kuesioner 	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Akuntansi berpengaruh terhadap Laporan Keuangan Daerah, Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Laporan Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah
----	---	---------	--	------	--	--	--

7.	Pengaruh Komitmen Organisasional, Sistem Informasi Akuntansi, Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Ardy Frasca Nugroho, Setyowati Widhy	STIE Bank BPD Jateng, Semarang	2019	pengaruh komitmen organisasional, sistem informasi akuntansi, dan internal audit terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.	<ul style="list-style-type: none"> - Teknik sampel menggunakan <i>purposive sampling</i> - Metode analisis menggunakan regresi linier berganda - Survey menggunakan kuesioner - Sampel berjumlah 125 responden 	. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen organisasional, sistem informasi akuntansi, audit internal mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal secara signifikan dengan arah yang positif.
----	---	--------------------------------------	--------------------------------	------	--	--	---

8.	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan	Fikri, Sri Pancawai	Universitas Mataram NTB	2016	bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, dan peran audit internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderating.	<ul style="list-style-type: none"> - Teknik sampel menggunakan <i>purposive sampling</i> - Metode analisis menggunakan regresi dengan variabel moderating - Survey menggunakan kuesioner 	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintahan penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi aparatur, peran internal audit memiliki berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan sistem pengendalian intern sebagai variabel moderating
----	--	---------------------	-------------------------	------	---	---	--

B. Pengaruh/Hubungan Antar Variabel

1. Hubungan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem informasi akuntansi dirancang untuk mempermudah setiap entitas dalam menyusun laporan keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan tersebut diperlukan suatu sistem akuntansi keuangan daerah yang didasarkan atas standar akuntansi pemerintah. Dengan bantuan sistem informasi akuntansi akan memberikan manfaat yaitu:

1. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu sehingga dapat melakukan aktivitas utama pada value chain secara efektif dan efisien.
2. Meningkatkan efisiensi.
3. Meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan.
4. Meningkatkan sharing knowledge.
5. Menambah efisiensi kerja pada bagian keuangan.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan uraian di atas telah dilakukan oleh Vidyasari (2021) yang memberikan informasi bahwa sistem akuntansi keuangan daerah memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian peningkatan sistem akuntansi keuangan daerah yang efektif akan membantu proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan sehingga dapat meningkatkan laporan keuangan daerah. Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini untuk menguji kembali hubungan antara Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Hubungan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber daya manusia merupakan seseorang/individu yang memiliki tanggungjawab untuk melakukan sebuah tugas yang telah diberikan dalam suatu organisasi. Oleh karena itu, maka harus dipastikan bahwa pengelola sumber daya manusia dilakukan secara optimal agar mampu memberikan kontribusi lebih terhadap pencapaian tujuan sebuah organisasi. Kompetensi sumber daya manusia sangat berperan penting dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan adanya sumber daya manusia yang berkompoten dan memiliki pemahaman terhadap pengelolaan keuangan daerah, diharapkan OPD dapat menghasilkan laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitas laporan keuangan.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan uraian di atas telah dilakukan oleh Agustin (2020) yang memberikan informasi bahwa sumber daya manusia memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian semakin baik kompetensi sumber daya manusia, maka kualitas laporan keuangan daerah semakin meningkat. Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini untuk menguji kembali hubungan antara kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

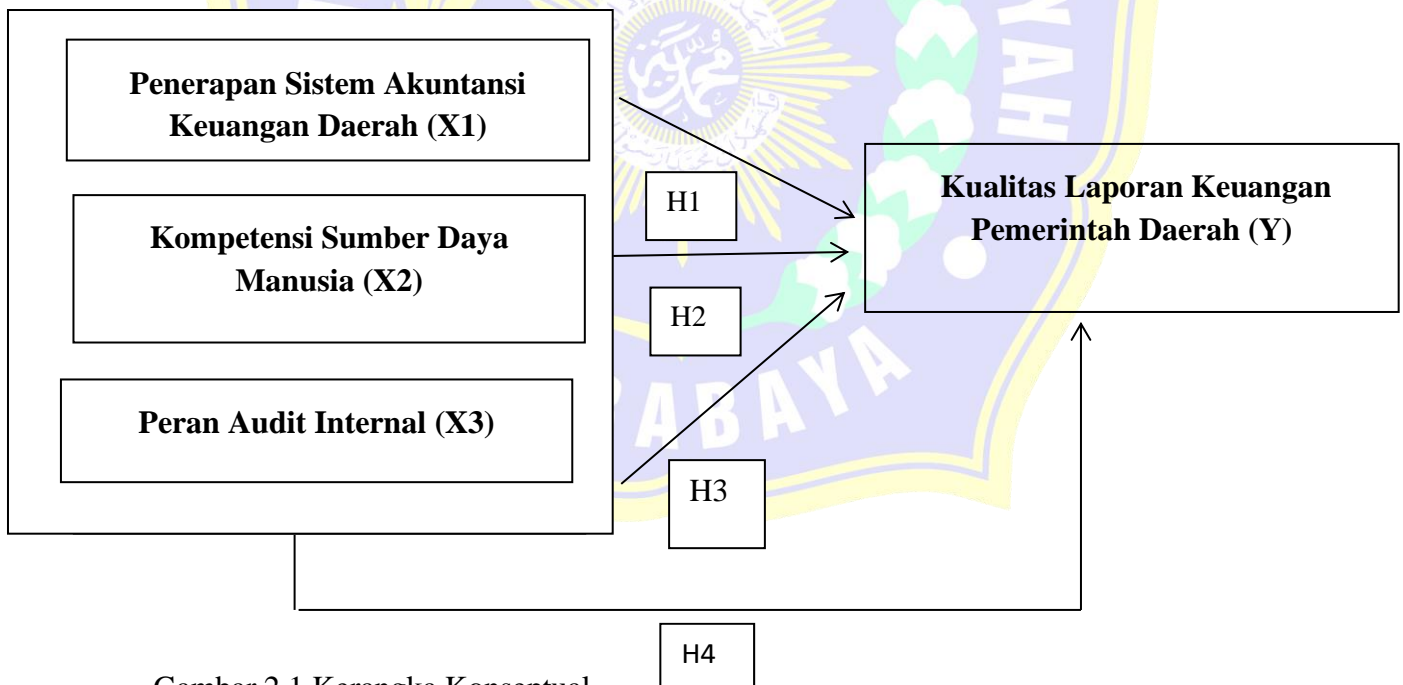
3. Hubungan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berkaitan dengan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dalam pasal 9 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004 disebutkan bahwa: “Dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan

dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah.” Peran dan fungsi audit internal termasuk unsur yang penting dalam sistem pengendalian organisasi yang memadai.

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh hubungan antara variabel terikat yaitu kualitas laporan keuangan dengan variabel bebas yaitu sistem akuntansi pemerintah daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Peran Audit Internal. Kerangka penelitian ini digunakan untuk mempermudah jalan pemikiran terhadap permasalahan yang dibahas. Adapun kerangka konseptual penelitian ini digambarkan pada model berikut ini:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Sumber : Peneliti (2021)

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka konseptual yang telah digambarkan, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1 : Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Berpengaruh positif dan Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

H2 : Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

H3 : Penerapan Peran Audit Internal Berpengaruh positif dan Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

H4 : Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Audit Internal Berpengaruh positif dan Signifikan secara simultan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

